

Pendidikan Kewarganegaraan dan Ketahanan Nasional

Oleh

Ermanovida

Abstrak

Matakuliah education of civic have heavy duty to develop; build nation to mentality, especially student circle. Cultivation of values of pancasila absolute in this matakuliah. Like phenomenon which lose lokks in this matakuliah. Amount of sks which a few/little, membership of lecturer which do not be focused, making doubt of ability of this matakuliah can share big for the rising generation. Continuous effort require to be in so many activity related to education of civic, can assist effectiveness forming of taft the rising generation mentality.

Keyword : education of civic, mentality, the rising generation

Pendahuluan

Beberapa hari belakangan ini suasana di negara Indonesia memanas. Beberapa peristiwa ironis mencuat, antara lain peristiwa Unas, Monas, Ahmadiyah dan lain-lain. Semua itu mencerminkan adanya ketidakpuasan warga negara terhadap negara.

Munculnya tindakan kekerasan antar anak bangsa yang menyertai demonstrasi, memperlihatkan perilaku yang kurang terpuji. Saling mencaci maki, dorong mendorong, baku hantam, gontok-gontokan secara fisik, dan sebagainya.

Beberapa persoalan mendasar memang sedang mendera negeri tercinta ini. Kenaikan BBM, korupsi dikalangan elite, perpecahan partai politik, kericuhan pasca pilkada dan lain-lain. Semua itu mampu membangkitkan amarah rakyat banyak.

Amarah rakyat dipalikasikan dalam bentuk perilaku yang tidak simpatik. Perilaku tersebut mengaburkan tentang ciri khas budaya bangsa. Yang sebenarnya sangat kental dengan nilai-nilai budaya yang tinggi, nilai-nilai yang tercermin dalam setiap sila pancasila.

Lantas apa yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat kita? Khususnya para mahasiswa, sebagai intelektual muda kampus. Yang kerap kali menjadi barisan yang terdepan dalam peristiwa demonstrasi yang kerap diwarnai dengan perilaku kekerasan. Ketahanan nasional dalam bentuk perilaku telah bergeser dari landasannya.

Pemahaman tentang ketahanan nasional

Ketahanan nasional secara konseptual dilatarbelakangi oleh :

- a. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu

mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.

- b. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun luar.
- c. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna ketertahanan dan stabilitas, yang didalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan. (Usman 2003, dalam Kaelan 2007)

Berdasarkan konsepsi diatas ketahanan nasional mengandung pengertian sebagai suatu kekuatan yang membuat suatu bangsa dan negara dapat bertahan, kuat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

Konsekuensinya suatu ketahanan harus disertai dengan keuletan. Keuletan diartikan sebagai usaha terus menerus secara giat dan berkemauan keran kecakapan dengan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. (Kaelan 2007)

Menurut Minto Rahayu untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, warga negara Indonesia perlu memiliki semangat berjuang dalam bentuk non fisik, sadar dan peduli akan pengaruh yang timbul pada aspek POLEKSOSBUD sehingga mampu mengantisipasinya. Dalam menghadapi lingkungan strategis, terutama dalam negara Indonesia yang telah menegara sejak 17 Agustus 1945, namun dengan visi baru, yaitu menciptakan tatanan masyarakat madani yang berlandaskan kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan hak azazi manusia masyarakat madani dengan ciri : beridentitas, beradab, bermoral, beretika, mandiri, rasional, profesional dan aktif dalam kehidupan nasional.

Meninjau dari perilaku demonstran ternyata bertolak belakang dengan ciri-ciri

yang seharusnya melekat pada masyarakat madani yang dicita-citakan, yang syarat dengan nilai-nilai pancasila. Sehingga perwujudan ketahanan nasional masih sangat perlu diperhatikan.

Apalagi bila mengingat ternyata para pelaku demonstran adalah generasi muda, dan sebagai kaum intelektual bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan Menanamkan nilai-nilai Pancasila

Pada tanggal 9 s/d 18 Juni tahun 2008, DIKTI menyelenggarakan Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan (SUSCADOSWAR) di Hotel PitaGiri Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 30 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari seluruh Indonesia. Termasuk Unsri yang mengirimkan dua orang dosen, Ibu Hj Umi Khotimah (FKIP) dan Ermanovida (FISIP).

Kegiatan ini merupakan agenda tetap dari DIKTI dalam mempersiapkan para dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga syarat seorang dosen untuk mengajar PKN, harus kursus dulu dapat terpenuhi.

Visi matakuliah ini merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Misi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, memrapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab. (Modul Suscadoswar, 2008)

Dari misi dan visi diatas terlihat jelas bahwa matakuliah ini memounyai tugas yang besar dalam membangun mentalitas anak bangsa. Mentalitas yang merupakan

pilar dalam pembangunan ketahanan nasional.

Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membangun mentalitas generasi muda dengan pendidikan demokrasi. Berkenaan dengan itu Bahmuler : 216-221 mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi suatu negara, yaitu "... *the degree of economic development ; ... a sense of nasional identity; ... historical experience and elements of civic culture.*" Maksudnya bahwa tingkat perkembangan ekonomi, kesadaran identitas nasional pengalaman sejarah serta budaya kewarganegaraan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara. Salah satu unsure dari budaya kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleransi kehidupan yang kooperatif, solidaritas dan semangat kemasyarakatan.

Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan "*civic community*" atau "*civil society*" atau masyarakat madani untuk Indonesia. Dengan kata lain tumbuhnya dan berkembangnya masyarakat madani bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan. Oleh karena itu diperlukan adanya peranan pendidikan kewarganegaraan yang dalam waktu bersamaan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan budaya kewarganegaraan yang menjadi inti dari masyarakat madani. Inilah merupakan tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan demokrasi dan hak azazi manusia di Indonesia.

Menurut Professor Udin, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana pendidikan demokrasi yang mengandung tiga dimensi konseptual interaktif, yaitu kajian ilmiah kewarganegaraan, program

kurikuler kewarganegaraan dan aktivitas social cultural kewarganegaraan. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia yang religious dan mencerdaskan sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 dan bersifat multi dimensi serta ditangani secara professional.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu tubuh atau sistem pengetahuan yang memiliki 1) *ontology civic behavior dan civic culture* yang bersifat multidimensional. (Filosofis, ilmiah, kurikuler, social cultural). 2) *Epistemologi research development, and diffusion* dalam bentuk kajian ilmiah dan pengembangan program kurikuler, perilaku dan konteks social cultural warganegara, serta komunikasi akademis. Kurikuler dan social dalam rangka penerapan hasil kajian ilmiah dan pengembangan kurikuler dan instruksioanl untuk warga negara di sekolah masyarakat. 3) Aksiologi untuk memfasilitasi pengembangan body of knowledge sitem pengetahuan atau disiplin pendidikan kewarganegaraan, melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah dan meringkai dan memfasilitasi berkembangnya koridor proses demokratisasi secara social cultural dalam masyarakat.

Membangun mentalitas anak bangsa tidak terlepas dari upaya penanaman nilai-nilai pancasila. Hakekat pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Adapun sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat, pancasila merupakan norma, sedangkan aktualisasi Pancasila merupakan realisasi kongkrit.

Dalam modul I mata kuliah pengembangan kepribadian yang diterbitkan Universitas Indonesia, 2007, dijelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sialnya.

Nilai-nilai tersebut adalah nilai religious yaitu pandangan tentang yang sakral/suci pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian nilai moral, yaitu nilai yang berdasar pada prinsip kebaikan dan mengarahkan manusia untuk menjunjung kejujuran, keadilan, memiliki hati nurani dalam bentuk perilaku.

Selanjutnya nilai kebangsaan adalah nilai yang menghargai tentang hak, kewajiban, tanggung jawab serta identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian nilai keadilan yang menjunjung norma atas dasar, kesetaraan, keseimbangan, ketidakberpihakan terhadap sesuatu. Nilai menghargai hubungan antar individu melalui kesadarannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kendala Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ternyata punya andil yang sangat besar dalam konteks yang lebih luas sebagai upaya ketahanan nasional. Tujuan mulia untuk membentuk mentalitas insan-insan muda kampus, adalah suatu tugas yang berat.

Namun ternyata ada beberapa fenomena yang terjadi dalam proses pengajaran pendidikan kewarganegaraan di kampus. Dari diskusi-diskusi yang berkembang selama kursus SUSCADOWAR, terungkap bahwa ada pandangan yang kurang tepat terhadap matakuliah ini. Dari mahasiswa muncul anggapan bahwa mata kuliah ini tidak begitu penting, hanya semacam pengulangan seremonial dan tidak begitu bermakna. Disisi dosenpun, terutama yang tidak mengajar, terdiri dari beberapa disiplin ilmu, terkadang jauh dari spesialisasi atau bidang keahlian yang dimilikinya. Sehingga kesan yang muncul juga alakadarnya. Yang penting materi kuliah sampai ke mahasiswa. Kemudian mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa-mahasiswa pada semester awal

dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS, setelah itu selesai.

Ditinjau dari pembekalan yang diberikan pada dosen pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk kursus, terasa sangat kurang. Di Indonesia tidak ada universitas yang khusus mendidik dosen untuk mengajar di perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan S2 khusus Ketahanan Nasional (Tannas) baru diselenggarakan oleh dua perguruan tinggi yaitu, Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mad. Lulusannyapun tidak ditujukan untuk menjadi dosen-dosen kewarganegaraan yang handal, namun sebagai ahli-ahli strategi nasional dalam lingkup yang lebih luas, yaitu negara.

Melihat fenomena yang ada seperti diatas, terasa agak berlebihan mengharapkan Pendidikan Kewarganegaraan dapat membangun mentalitas generasi muda sebagai wujud dari ketahanan nasional. Karena pembangunan mentalitas manusia seharusnya dibangun secara terus menerus. Bukan hanya satu semester dengan dua SKS dan pada semester satu, setelah itu selesai. Kenyataan yang ada para demonstran yang sering dilakukan oleh mahasiswa secara anarkhis, justru dilakukan para mahasiswa pada saat diatas semester satu. Artinya setelah dia selesai mendapat pengajaran dan pendidikan mata kuliah kewarganegaraan.

Sebagai tindak lanjut mata kuliah ini, maka kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai upaya penyelenggaraan secara terus menerus perlu dilakukan oleh perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan ilmiah perlu dilakukan secara periodik dan terintegrasi antara program studi, jurusan, fakultas maupun universitas.

Kegiatan tersebut dapat saja dilakukan dengan kaitan mata kuliah, seminar, lokakarya atau kunjungan-kunjungan ilmiah. Sehingga muatan materi-materi dalam pendidikan kewarganegaraan dapat terus menerus dihidupkan.

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan sangat besar peranannya dalam upaya menciptakan ketahanan nasional. Perguruan tinggi diharapkan mampu mempersiapkan warga negara intelektual yang cerdas dan punya mentalitas yang tangguh.

Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian penanaman nilai-nilai penting

daalm kewarganegaraan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Metode pembelajaran harus dibuat dengan menyenangkan dengan melalui dialog kreatif. Sehingga akan muncul generasi yang handal dan punya kemampuna untuk mengubah struktur masyarakat menjadi lebih berbudaya.

Daftar Pustaka

Rahayu Minto, Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa, PT. Gramedia Jakarta, 2007

Kaelan dan Zubadidi Ahmad, Pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Paradigma Yogyakarta, 2007

Usman Wan dkk. Dan Kaelan, Daya Tahan Bangsa, Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Modul kursus calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), Prof. Dr. Udin. S. Winataputra, MA. Dkk, Dikti, 2008

Modul I Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Universitas Indonesia, 2007